

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak awal tahun 1990-an, konsep *civil society* menjadi wacana di lingkungan akademik maupun aktivis gerakan sosial. *Civil society* sering disebut masyarakat madani, masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, beradab atau masyarakat berbudaya. Sasson dan Anne Showstack dalam Hadiwijoyo (2012) mengartikan bahwa *civil society* merupakan realita individual yang meninggalkan ikatan keluarga dan memasuki persaingan ekonomi yang dikontraskan dengan negara (*state*) atau disebut sebagai masyarakat politik (Hadiwijoyo, 2012: 74).

Adam ferguson dan beberapa pemikir lainnya di Skotlandia mulai memisahkan antara fenomena masyarakat sipil dan negara (Hikam, 1996 dalam Hadiwijoyo, 2012: 78). Masyarakat sipil dinilai merupakan fenomena munculnya kemandirian masyarakat yang berseberangan dengan negara dalam arti kritis terhadap struktur dan kebijakan negara. Dalam realitas empirisnya masyarakat sipil mengorganisasi dirinya secara independen dari negara sekaligus mempunyai landasan pengetahuan yang menjadikan mereka berbeda dari masyarakat biasa yang tidak kritis dan pasif dalam struktur sosial yang bisa jadi menindas mereka. Secara mendasar masyarakat sipil menempatkan dirinya dalam posisi yang kritis terhadap negara dengan terus melakukan upaya perubahan-perubahan dalam bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik serta kontrol terhadap kekuasaan (Hadiwijoyo, 2012: 79).

Berdasar pengalaman perkembangan demokratisasi di negara-negara Eropa Timur, Hikam menunjukkan bahwa *civil society* sebenarnya juga merupakan suatu proses pergerakan demokrasi pada aras lokal (*democratic movement at a grassroots level*), yang melewati batas kekuasaan negara dan batas-batas kelas yang didasarkan kepada pemberdayaan masyarakat (Hadiwijoyo, 2012: 79). Merujuk kepada Hikam bahwa *civil society* adalah kenyataan dari kehidupan sosial yang terorganisasi yang bersifat sukarela, swadaya, swasembada dan terbebas dari tekanan negara yang terikat oleh hukum yang berlaku. Dengan demikian pandangan ini pada hakekatnya

menginginkan adanya suatu masyarakat yang mempunyai kemandirian dan terbebas dari hegemoni negara (Hadiwijoyo, 2012: 74).

Didalam hal ini memang dapat terjadi suatu situasi hegemoni yang dilawan dengan *counter hegemony*, namun tidak berarti bahwa *state* dan *society* harus selalu bertentangan. Kelompok ini memberi istilah baru sebagai masyarakat warga atau masyarakat kewargaan. Maka dari *civil society* ini mengandung konotasi adanya masyarakat yang beradab (*civillized society*) yang lebih menganut aturan-aturan yang berkaitan dengan sistem hukum daripada aturan yang bersifat otoriter yang menindas. Dengan demikian pandangan ini menganggap *civil society* sebagai suatu gerakan rakyat untuk membebaskan diri dari hegemoni negara (Hadiwijoyo, 2012: 74-75).

Masyarakat sipil atau *civil society* muncul karena adanya kemandirian dari masyarakat dan terbebas dari hegemoni negara. Hal ini seperti kasus yang terjadi di Desa Gondang Wetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk terkait dengan pembangunan pariwisata pemandian sumber air panas “Banyu Biru”. Pariwisata merupakan sektor yang ikut berperan dalam proses meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat. Berbicara tentang pariwisata, ia sebenarnya bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebuah gerakan sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik yang untuk mengembangkannya dibutuhkan *political will* negara (Rosyadi, 2016: 4). Dalam kasus ini, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk telah observasi dan mengunjungi fenomena sumber air panas Banyu Biru dan memiliki rencana untuk dikembangkan menjadi lokasi wisata yang nantinya dapat menambah pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

“Social Welfare is the organized system of social service and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationship that permit them to develop their full capacities and to promote their well being in harmony with the needs of their families and the community” (hal.4) (Friedlander dalam Fahrudin, 2012: 9).

Kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh (Friedlander dalam Fahrudin, 2012: 9) memiliki arti sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan

sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. Agar masyarakat khususnya Desa Gondang Wetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dapat sejahtera secara ekonomi dan dengan adanya potensi wisata dari sumber air panas ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Dengan itu, Pemerintah Kabupaten Nganjuk berencana akan mengelola sumber air panas yang bernama Banyu Biru ini.

Rencana pengelolaan sumber air panas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk ini tidak berjalan mulus, wacana Pemerintah Tingkat II ini ditolak oleh masyarakat Desa Gondang Wetan dan masyarakat bersikukuh untuk mengelola dan mengembangkannya secara mandiri atau secara swakelola. Pengelolaan wisata pemandian sumber air panas ini hingga saat ini dikelola oleh masyarakat setempat dengan pengawasan oleh pemerintah Desa Gondang Wetan dalam hal ini adalah kepala desa terkait (*Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 29 September 2018 di Ds. Gondang Wetan, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk*).

Keinginan masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan wisata pemandian sumber air panas Banyu Biru secara mandiri merupakan ciri yang melekat pada masyarakat sipil atau *civil society* (Kelompok Banyu Panas) untuk mengelola penuh wisata Banyu Biru secara swadaya, sukarela, swasembada dan mempunyai kemandirian untuk mengelola wisata pemandian sumber air panas “Banyu Biru” tanpa tekanan dari negara atau tanpa hegemoni dari pemerintahan daerah. Namun, dalam hal ini negara atau pemerintah daerah bertugas sebagai pengawas dan koordinator dari terselenggaranya pengelolaan wisata ini.

Banyu Biru sendiri dahulu merupakan hasil pengeboran sumur yang akan digunakan untuk irigasi sawah, namun tanpa diduga sumber air yang keluar bersuhu tinggi atau panas. Padahal di lokasi Desa Gondang Wetan adalah dataran rendah dan bukan merupakan wilayah pegunungan.

“Pemandian air panas di Jatikalen ini ditemukan pertama kali oleh warga yang sedang mengebor sumber air untuk mengairi sawah. Namun tak disangka, justru sumber air yang keluar merupakan sumber air panas pada saat mencapai kedalaman sekitar 240 meter. Hingga sekarang tempat ini menjadi wisata dan dipercaya sebagai pengobatan alternatif. Terletak di perbatasan antara kota Nganjuk dan Jombang, tepatnya Desa Gondang Wetan atau sekitar 35 kilometer dari pusat Kota Nganjuk” (<http://koranmemo.com/> diakses pada tanggal 02 Oktober 2018)

Fenomena munculnya sumber air panas ini menggegerkan warga, Akhirnya warga setempat secara bahu-membahu membangun wadah air untuk sumber air panas tersebut yang setelah itu digunakan untuk mandi warga setempat dan dipercaya memiliki khasiat dapat menyembuhkan penyakit, seperti penyakit kulit, pegal linu dan yang lainnya. Lambat laun, fenomena munculnya sumber air panas ini didengar oleh masyarakat luas sehingga penasaran dan banyak yang mengunjungi Banyu Biru hanya sekedar mandi dan mengambil air untuk diminum serta dibawa pulang. Banyaknya wisatawan atau pengunjung yang datang di Banyu Biru mendorong masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan kreatif demi meraih keuntungan secara ekonomi berdasarkan pemanfaatan adanya wisata Banyu Biru. Hal ini terbukti bahwa di tempat wisata tersebut terdapat banyak kedai dan warung serta pusat oleh-oleh (*Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 29 September 2018 di Ds. Gondang Wetan, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk*).

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui peran Pengurus Kelompok Banyu Panas dalam pengelolaan wisata Banyu Biru di Desa Gondang Wetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti terfokus tentang bagaimana peran pengurus kelompok Banyu Panas dalam mengelola wisata pemandian sumber air panas “Banyu Biru” di Desa Gondang Wetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh pengurus

kelompok Banyu Panas dalam mengelola wisata pemandian sumber air panas “Banyu Biru” di Desa Gondang Wetan Kecamatan Jaticalen Kabupaten Nganjuk.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulis diatas diharapkan dalam kepenulisan ini dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan bahan masukan atau referensi penelitian selanjutnya dengan fokus yang sama
- b. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pengembangan ilmu sosiologi terutama mengenai kehidupan sosial politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih kepada pihak-pihak yang sedang melakukan analisa berkaitan dengan pengembangan pariwisata daerah.
- b. Mampu memberikan pengetahuan bagi pembaca khususnya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura terkait dengan materi sosiologi pariwisata.
- c. Diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan Banyu Biru yang dikembangkan secara mandiri dan swakelola oleh Kelompok Banyu Panas di Desa Gondang Wetan Kecamatan Jaticalen Kabupaten Nganjuk.